



Sugeng: Belum Ada Bantuan dari Pusat

Soal Ancaman Menteri LH ke Jalur Hukum
karena Dinilai Tak Becus-Atasi Sampah

JOGJA - Menteri Lingkungan/
Kepala Badan Pengendalian Ling-
kungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol
Nurofiq bakal menyeret Pemkot
Jogja ke ranah hukum. Itu imbas

tidak becusnya pemkot dalam
pengelolaan sampah. Penjabat (Pj)
Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto
selaku kepala daerah pun merespon
hal ini ■ *Baca Sugeng... Hal 7*

Sugeng: Belum Ada Bantuan dari Pusat

Sambungan dari hal 1

Sugeng mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti soal rencana pelaporan dari kementerian itu. Apakah karena belum secara maksimal dalam pengelolaan sampah atau hal lain. Meskipun demikian, ia berharap ada pengertian dari pemerintah pusat bahwa pemkot kini tengah berproses dalam upaya pengelolaan sampah.

Sugeng pun menyinggung soal belum adanya bantuan dari pemerintah pusat soal penanganan masalah sampah. Lantaran sepengetahuan dia, selama ini pemkot masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menanggulangi persoalan sampah.

"Setahu saya belum ada

(bantuan) dari pusat. Selama ini masih uangnya pemda. Tapi kalau secara detail saya belum tahu *policy*-nya, karena selama ini pengelolaan masih APBD Kota Jogja," ujar Sugeng saat dikonfirmasi kemarin (19/11).

Ia mengakui dalam proses menangani sampah di Kota Jogja cukup kewalahan. Sebab, menurutnya, produksi 200 ton sampah per hari bukan jumlah sedikit. Apalagi empat tempat pengolahan sampah yang dimiliki Pemkot Jogja belum beroperasi optimal.

Sugeng menjelaskan, dari empat titik pengolahan sampah milik pemkot itu, baru bisa mengolah sekitar 160 ton sampah per hari. Sehingga, lumrah jika masih ada penumpukan sampah di beberapa depo. Sebab kapasitas tempat pengolahan

di Kota Jogja belum mampu untuk menampung produksi sampah dan depo hanya sebagai transit poin atau penampungan sementara.

Ia pun berharap Menteri Lingkungan Hidup juga dapat memahami kondisi ini. Lantaran dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, akan sulit membangun tempat pengolahan sampah. Meski demikian, pemkot terus berkomitmen untuk menangani sampah. Salah satunya melalui pengadaan mesin insinerator yang beroperasi 2025.

"Semoga pusat bisa memahami, karena kami menyediakan tempat pengolahan sampah dekat perumahan elite dan berada di tengah kampung tidak ada demo itu saja sudah luar biasa. Sehingga kami berharap pusat bisa membantu dengan solusi yang belum bisa kami

tangani," tambah Sugeng. Sebagaimana diketahui, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq geram saat melihat pengelolaan sampah di Depo Mandala Krida yang semrawut.

Hanif menilai, pemkot tidak serius dalam menangani permasalahan sampah.

Menteri itu juga mendesak pemerintah daerah bertanggung jawab atas permasalahan itu. Hanif pun berencana memanggil pemkot untuk menjelaskan secara rinci soal pengelolaan sampah di Kota Jogja. Bahkan juga akan menyeret pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah ke ranah hukum, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008, apabila ditemui pelanggaran.

Ia berjanji akan menurunkan tim penyidik dan pengawas lingkungan hidup un-

tuk menyelidiki masalah sampah di Kota Jogja. Serta memastikan ada langkah penegakan hukum yang bakal diambil terhadap pihak

yang terbukti lalai dalam proses pengelolaan sampah. "Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum. Ini harus ada tersangkanya, agar

masyarakat mendapat rasa keadilan," tegas Hanif usai meninjau Depo Mandala Krida Jogja, Senin (18/11) lalu. (inu/laz/zt)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005